

UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
**PROGRAM PASCA SARJANA**

Jln. Affandi, Gejayan, Mrican, Tromol Pos 29 Yogyakarta 55002

Telp. : (0274) 513301, 515352 ext 1431 Fax : (0274) 562383 E-mail : pasca@usd.ac.id

**SURAT TUGAS**

**Nomor: 027.h/Dir/PPs-USD/ST.01/X/2023**

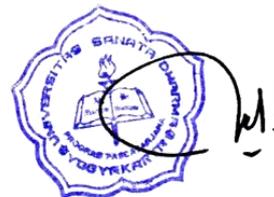
Direktur Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. G. Budi Subanar, S.J  
NPP/NIDN : P.1811 / 0502036301  
Pekerjaan : Dosen Tetap Program Doktor Kajian Budaya, Program Pascasarjana  
Unit Organisasi : Universitas Sanata Dharma  
Alamat : Mrican, Tromolpos 29, Yogyakarta 55002  
Telp. 0274 – 513301, 515352, Fax. 562383  
Untuk Keperluan : Menjadi Pembicara dalam rangka kegiatan HUT Kota Yogyakarta tahun 2023  
Waktu : 9 Oktober 2023  
Biaya : Pemda DIY

Dengan ketentuan bahwa:

1. Pelaksanaan tugas tersebut tidak mengganggu tugas pokoknya di Universitas Sanata Dharma.
2. Yang ditugasi memberikan laporan kepada Direktur Program Pascasarjana tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Yogyakarta, 1 Oktober 2023  
Direktur Pascasarjana



F.X. Mukarto, Ph.D

## MENIMBANG JOGJA DENGAN PREDIKAT “KOTA BERSUMBU FILOSOFI”

Oleh Dr. G Budi Subanar, SJ

- 1) Belum lama ini Yogyakarta mendapat penetapan dari UNESCO terkait pengajuannya sebagai “kota dengan sumbu filosofi” yang ditarik dari Kraton – Tugu ke Utara ke Gunung Merapi. Ke Selatan Panggung Krapyak terus mengarah ke Samudera Indonesia
- 2) Beberapa hari yang lalu, 7 Oktober 2023 HUT 267 Yogyakarta – pemindahan dari Ambarketawang ke Kraton yang sekarang. Ditandai dengan candra sengkala *Dwi Naga Rasa Tunggal*. (1682) Satu simbolik – yang mengungkap dan menyimpan.
- 3) Mengaitkan kedua hal di atas, ada pemutus hubungan. Ambarketawang sebagai *embrio* tidak lagi ditempatkan di dalamnya. Perpindahan dari Ambarketawang ke Kraton yang dibangun di Hutan Pacetokan – Hutan Beringan memuat pertimbangan tertentu. Saya rumuskan sebagai “Membangun kota benteng”. Sebagai keahlian Pangeran Mangkubumi (HB I). Gunung Gamping menjadi benteng alami. Ada peninggalan yang lain berupa benteng reruntuhan yang ada di desa Mejing. (Foto Masih termuat dalam buku *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. Dan masa berikutnya benteng dibangun dalam kraton sampai 1792. Uraian saya akan saya tempatkan pada Pemahaman Pembangunan kota benteng ini. Serta mengacu tulisan berbagai sejarawan.
- 4) Sejarawan yang memperlihatkan Yogya kota Benteng adalah Ricklef – *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749 – 1792* (1974) Peter *Kuasa Ramalan. Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855* (2012). Sartono Kartodirdjo – *Sejarah Perlawanan Perlawanan terhadap Kolonialisme* (1973) Dr. Soekanto *Perjanjian Gianti Perang Pahlawan Diponegoro Jogjakarta 1755 – 1825* Prof Solo Soemardjan - *Social Change in Jogjakarta* (1962)/ *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (2009), dan seterusnya. Pada satu sisi membangun tradisi, dan menguatkannya. Pada sisi lain menanggapi situasi aktual dengan kreativitas.
- 5) Pokok-pokok yang dikemukakan Ricklef – memulai pembahasan dengan tahun 1749, sebelum Perjanjian Gianti – mereaksi terhadap campur tangan Belanda dengan perjanjian/ campur tangan yang melemahkan. Penulisan Sejarah yang digunakan adalah babad, dan arsip-arsip sejarah/ peristiwa yang memberi pendasaran kejadian dari narasi babad. Pembagian bab-babnya (1) The Historical Background (2) Rebellion and the Division of the Kingdom (1726 – 1754) (3) The Transition to a peaceful division and the foundataion of Jogjakarta 1755 – 1757 (4) Eliminating Option I and II (1757 – 1765) (1761 – 1771) (6) Preparing for a new age 1768 – 1775 (7) New Age in Javanese Literature (8) Permanently devided Kingdom 1774 - 1787 (9) Crisis in Surakarta 1787 – 1790 (10) Succession of the Younger generation 1791 – 1792 (11) Yogyakarta and the Dutch (12) Consequences of Permanent Division .
- 6) Peter Carey: Ada sebuah pengakuan rendah hati dari Peter Carey yang menampilkan Diponegoro. Dia menyebutnya membuat potret Pangeran Diponegoro sebagai “sebuah sketsa leretan atau arsiran *pointiliste*. Aliran pasca-impresionis [dalam seni rupa], [dengan membuat] sejumlah titik-titik

noctah yang disatukan memberi bayang-bayang kedalaman, gerak dan rona” (I, hal 147). Setelah ungkapan tersebut, masih diberi catatan “... pada akhirnya yah cuma itu, suatu kesan jika bukan suatu tipuan mata (*trompe-l’oeil*)”.

Peter Carey mengetengahkan sosok Diponegoro secara komprehensif, mendalam dan menyeluruh. Sebagai pribadi, dari masa kecil, dewasa dan kemudian masuk pengalaman perjuangannya. Putra bangsawan (putra dari Putra Mahkota HB II) yang tumbuh di luar lingkungan istana. Dalam asuhan sang nenek (Ratu Ageng), dan ibunya yang saleh dan sekaligus pekerja. Neneknya yang keluar istana, *concern* pada bidang pertanian dan agama. Dalam masa pertumbuhannya, peran perempuan ditempatkan pada posisi pokok. Tapi tidak melulu di dalam wilayah domestik, dalam rumah tangga. Ada juga perempuan yang menjadi teman bermain catur. (Catur menjadi salah satu kegemarannya.) Ada pasukan perempuan yang ditampilkan sultan dan dikagumi Raffles. Dan peran perempuan dalam Perang Jawa. (Dalam kraton Surakarta, Kanjeng Ratu Mas Balitar, Permaisuri Pakubuwono I memerintahkan penerjemahan sejumlah naskah. Lih. Alex Sudewa, *Dari Kartasura ke Surakarta. Studi Kasus Serat Iskandar*.) Sekaligus diperlihatkan Pangeran Diponegoro sebagai bangsawan yang tumbuh dan bergaul dengan bermacam lapisan masyarakat, petani, kyai, dan kalangan bangsawan sendiri.

Pendidikan yang dijalani di luar istana, membuat pendidikan menjadi lebih intensif. Intelektualitasnya antara lain diperlihatkan dengan berbagai koleksi buku yang dimilikinya. Dari teologi, moral, fikih; sejarah tokoh yang kemudian menjadi idola, sastra Jawa dan wayang juga.

Sejumlah inspirasi yang ditimba dari pengetahuan terkait dengan pemilihan nama (Ngabdulkamid – Abdul Hamid) Ali Basah (Ali Pasha). Dan juga gambaran ideal yang terkait dengan penglihatannya. Mis. panah Arjuna. Terdapat keragaman referensi dari berbagai tradisi. Isi buku-buku koleksinya juga tertuang dalam karyanya, nasehat untuk anak-anaknya. (Walau tulisan tangannya sendiri jelek.)

Dalam cara bergaulnya dan menunjuk orang lain yang penting, P. Diponegoro disebutkan menggunakan “*ngelmu firasat*” (I, 84). Juga menghargai (agama) orang lain. Antara lain dalam kesannya terhadap John Crawford dan Knoerle yang menemani P Diponegoro dalam perjalanan menuju tanah pembuangan. Terasa sikap terbuka menerima keragaman.

Dalam hubungannya dengan Kraton, sikap P. Diponegoro adalah terlibat sekaligus mengambil jarak. Antara lain karena intrik-intrik dalam istana. Yang khas diperlihatkan bahwa Pangeran Diponegoro secara minimal hadir dalam *pisowanan* pada tiga (3) kali acara grebeg (I, 102). Pada masa harus membela keberadaan ayahandanya, Pangeran Diponegoro kerap mengadakan pertemuan rahasia di kadipaten (I, 366) Merasa tidak kerasan tinggal di lingkungan kraton saat ayahnya menjadi sultan. Menjadi wali bagi sultan yang belum cukup usia.

Perkembangan kedewasaan ditempatkan sebagai bingkai seluruh perjalanan hidupnya. Terlebih yang terkait dengan ramalan yang didengarnya tatkala mengadakan perjalanan spiritualnya. Dalam bingkai ramalan itu, seluruh periode ditempatkan. Sampai pada keadaan yang terakhir (II, 771). Ada gabungan pembahasan sejarah secara diakronis dan sinkronis. Diakronis dalam perjalanan waktu yang maju. Sinkronis menempatkan berbagai unsur yang membentuk sejarah tersebut berlangsung.

Saya membayangkan Peter Carey sebagai sejarawan bekerja bagaikan seorang detektif yang sangat profesional. Semua hal ditelusuri sangat teliti sampai mendetil. Setiap tokoh yang disebut diberi latar belakangnya dan konteksnya sehingga jelas posisi dan perannya. Saling dipertemukan dalam keragaman peristiwa dan masalahnya. Semuanya tersebut ditempatkan di seputar tokoh Pangeran Diponegoro yang menjadi sorotan utamanya. Dalam seluruh pembahasannya tersebut, Bapak Peter Carey menyajikannya dalam ulasan yang luas sekaligus mendalam.

Buku Diponegoro yang ditulis Peter Carey sangat fenomenal bagi saya. Peter Carey mengungkapkan motivasi yang melatar belakangi terjemahannya dalam edisi bahasa Indonesia. Saat peluncuran perdana di Pendapa Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro di Yogyakarta Peter Carey mengungkapkan, "Buku ini saya persembahkan untuk seratus tahun bangsa Indonesia". Wouw! Ada beberapa hal di balik 'wouw' saya. *Pertama*, buku ini merupakan hasil kerja riset yang panjang, hampir 35 tahun, terhitung dari 1973, saat pertama kali Peter Carey menginjakkan kaki pertama kali di Indonesia, sampai terbit buku 2007. *Kedua*, pandangan Peter Carey sudah menjangkau tahun 2045, saat bangsa Indonesia akan merayakan seabad kemerdekaannya. *Ketiga*, isi dari buku ini yang memperlihatkan kajian komprehensif sejarah Diponegoro dari perspektif politik dan ekonomi.

Buku ini dari pengembangan disertasi yang dipertahankan untuk meraih gelar doktor dalam bidang sejarah di Cornell University. Edisi bahasa Inggrisnya *The Power of Prophecy. Prince Diponegoro and the end of old order in Java, 1785-1855*, terbitan KITLV (2007) Terjemahan bahasa Indonesianya *Kuasa Ramalan. Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855* diterbitkan Penerbit KPG dalam kerjasama dengan beberapa pihak (2012). Dilaunching pertama kali di Pendopo Tegalrejo tanggal 8 Maret 2012. Dua istilah dalam judul, "kuasa ramalan" dan "tatanan lama" mengundang keinginan tahu lebih lanjut. Apakah ini mau membawa pengertian atas orang Jawa yang suka ramalan, Jangka Jayabaya tentang ramalan Ratu Adil? Memang demikian. Sejumlah ramalan terkait dengan Diponegoro dari kakeknya Mangkubumi (I, 175; II, 690). Serta ramalan yang didengarnya secara gaib waktu berziarah ke Parang kusuma. Sejak awal istilah pokok pada judul telah mendapat penjelasan (I, xxxiv, 82-84), dan terus dikupas pada bagian selanjutnya.

Riset arsip atas buku tersebut menghasilkan beberapa buku dan tulisan: *The Archive of Yogyakarta* Vol. I, Oxford, The Oxford University Press, (1980), *Babad Dipanagara; An Account of the Outbreak of the Java War, (1825-1830)*, Kuala Lumpur: Art Printers, (1981), *Asal usul Perang Jawa, Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Karya Raden Saleh* (1986), dan *Ekologi Kebudayaan Jawa dan Kitab Kedung Kebo* (1986). Sebuah artikel "A Jalan Maliabara ((garland bearing street): the etimology and historical origins of a much misunderstood Yogyakarta street name" dalam *Archipel* 27 hal. 51-62. Catatan kaki dari berbagai sumber pustaka, maupun arsip dalam terjemahan menjadi satu jilid sendiri (jilid III).

#### *Tentang Yogyakarta*

Dalam naskah *Katalog Induk Museum Sonobudoyo* terkait Babad Ngayogyakarta disebut sudah ditransliterasi untuk proyek Peter Carey. *The Archive of Yogyakarta* Vol I memberi keragaman detail atas sejumlah hal dari masa Sultan Hamengkubuwono I dan II. (Mis. Peraturan Sultan HB II tentang penghormatan terhadap kerabat kraton dan penggunaan *ageman* dan macam-macam asesoris yang lain (104-108). Berbagai daftar, antara lain uang membeli bunga untuk berbagai

makam, daftar nama utusan yang naik haji ke Mekah, mengirim uang korban (171-174). Buku Diponegoro (ini) menambahkan banyak hal. Termasuk data-data pembangunan kota dan pengembangan wilayah setelah *palihan negari*. (Dari 1756 sampai awal perang Jawa 1825). Sementara penelitian tentang nama Yogyakarta, Pak Peter Carey memperlihatkan ada yang mengaitkannya dengan nama Jendral Malborough (Inggris) yang terkait dengan Benteng Malborough di Bengkulu, dan juga dengan *maliabara*, satu istilah Jawa Kuno yang berarti “mengalungkan rangkaian bunga” untuk para tamu kehormatan yang datang. Sedangkan buku *Sekitar Yogyakarta 1756-1825* (1952) tulisan Dr. Soekanto memberi gambaran tentang segi politik dan hukum tentang keberadaan Kasultanan Yogyakarta.

Dalam buku *The Archive of Yogyakarta* dan *Sekitar Yogyakarta 1756-1825* ditampilkan sebuah sketsa/drawing karya de Nelly, seorang perupa Belanda, memperlihatkan sketsa wilayah kraton dan sekitarnya pernah dibuat sekitar 25 tahun setelah *palihan Negari* (tahun 1770-an). Saya menemukan sketsa serupa karya John Rach, gurunya de Nelly. Bapak Peter Carey mengemukakan satu kutipan Willem van Hogendorp (seorang kontrolir yang datang pasca Perang Diponegoro), menentang Yogyakarta yang dijuluki dengan Versailles Jawa. (I, hal. 1). Hal semacam ini meninggalkan sebuah tantangan untuk menindaklanjuti ungkapan tersebut. Ungkapan yang dikutip, dibuat setelah perang Diponegoro, artinya Yogyakarta telah banyak menjadi puing-puing. Kendati pun demikian, toh reruntuhannya membawa imajinasi tentang Versailles. Planologi macam apa yang ada atas Yogyakarta pada masa itu?

Latar belakang wilayah Yogyakarta yang ditampilkan dalam perbandingan dengan Solo, bagi pembaca yang masih punya *frame* suka memisahkan Yogya-Solo mungkin bisa mengundang masalah (I, 4 dst.) . Juga mengutip pandangan tertentu membandingkan kraton sultan dan kraton sunan (I, 203) Kendati pun, ketika menampilkan jumlah bangsawan yang rajin dengan keislamannya, Solo lebih ditempatkan dibandingkan Yogyakarta. Dalam sebuah data disebutkan, Sunan Pakubuwono IV mempunyai 2 istri sah, dan 26 selir dengan 56 anak dan 156 cucu. (II, 589) Sedangkan dalam Silsilah Sultan Hamengkubowono digambar memiliki 2 istri sah dengan beberapa putra (III, 909). Sebuah buku silsilah yang dibuat Keluarga Trah HB I-HB IX memperlihatkan Sultan Hamengkubuwono II dengan 4 istri sah, 21 selir dan 80 anak yang ditempatkan pada masing-masing isteri dan selir. Catatan lain yang mengganjal terkait dengan penggunaan istilah “dwifungsi” yang dimunculkan pada bagian akhir (II,771).

### *Perang Jawa (Perang Diponegoro)*

Eskalasi situasi perubahan jaman masa Sultan HB II di kalangan istana ditandai dengan gelar keprajuritan. Yang terus meningkat mengawali perseteruan dan intrik di kalangan istana. Berlanjut dalam berhadapan dengan Daendels yang memiliki perbedaan sikap terhadap Yogyakarta dan Surakarta. Sekaligus adanya konflik-konflik di dalam istana yang terus berkembang antara faksi Sultan Sepuh dan Pangeran wali yang diangkat Daendels. Sampai akhirnya berlanjut dengan pengantian penguasa dari Belanda ke Inggris. Perubahan penguasa yang tidak disadari dan kurang diperhitungkan akibatnya oleh Sultan Sepuh yang menjadi penguasa kerajaan.

Mendahului Perang Jawa, Peter Carey menentang dua peperangan, pertama terkait dengan pemberontakan Raden Ronggo, dan *Geger Sepoy*. Masing-masing dengan latar belakangnya yang sangat mendetil. Dan ini merupakan bagian dari proses krisis sebagaimana didengar oleh Pangeran

Diponegoro dalam ramalannya. Dan pemberontakan Diposono, beberapa tahun sebelum Perang Jawa.

Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa diketengahkan dengan berbagai sudut pembahasan. Penempatannya sebagai pemenuhan Ratu Adil, dilengkapi dengan berbagai gerakan ratu adil yang muncul di berbagai tempat. Dengan latar belakang berbagai keprihatinan, mulai dari kemerosotan dalam etika dan moral di lingkungan istana, situasi kemiskinan dan wabah, bahkan juga bencana alam yang berlangsung di lingkup wilayah kekuasaan dan sekitarnya. Buku Jilid II secara khusus membahas perkara tersebut. Sampai akhirnya perang meletus dan setelah berlangsung sekian lama, Pangeran Diponegoro dijebak di dalam ‘perjanjian damai’.

Dalam peperangannya, Diponegoro mengetengahkan keyakinan dasarnya yang berorientasi pada agama. Dengan gelar dirinya, pemberian gelar pengikutnya, penamaan pasukannya, atribut pakaian yang dikenakannya. Demikian pun, Belanda tidak menghentikan peperangan dan memberi konsesi damai seperti ada dalam sejarah sebelumnya, karena prinsip agama yang dipakai (II, 741). Kesetiaan orientasi Diponegoro diperlihatkan permasalahannya (II, 742). Peter Carey memperlihatkan problem pilihan orientasi kepemimpinan yang perlu dipilih Diponegoro. Hal yang justru menimbulkan konfliknya dengan Kyai Mojo sampai akhir hayatnya. (II, 749).

Sebelum keseluruhan kisah berakhir, nasib akhir dari ketiga tokoh, Diponegoro, Kyai Mojo, dan Basah Sentot sudah ditempatkan (II, 754). Tapi masih dilanjutkan dengan pembahasan strategi perang dan sejumlah hal lainnya. Bagi saya ini sebuah ‘sasmita’ dari Peter Carey. Ada bermacam kontras simbol, tindakan, dan prinsip Diponegoro yang saling simpang siur diketengahkan. Tanpa dikatakan, ini menjadi bukti-bukti yang memperlihatkan hal-hal yang tidak berdasar pada rasional yang kuat, atau tidak masuk akal.

Ada prinsip yang diperlihatkan secara kuat dalam berhubungan dengan pihak Belanda dirumuskan saat menghadiri ‘perjanjian damai’ saat akhir perang. Prinsip yang diminta terkait dengan relasi perdagangan, dan lain-lain. Dalam diri P Diponegoro justru memiliki kesadaran bagaimana mempertahankan milik yang menopang hidup dan harga diri berhadapan dengan jaman yang terus menggilas lewat kehadiran kaum penjajah yang mau mengangkut segala dengan membangun di wilayah jajahannya. Kecenderungan inilah yang dinegosiasi dengan ‘perjanjian damai’ tersebut. Ini yang menjadi titik balik yang membuka jaman baru sebagaimana ‘diramalkan’ oleh Pangeran Hendrik (II, 881).

#### *Catatan Akhir*

Diperoleh kesan kuat, dalam proses terpenuhinya ramalan, profil yang menghadirkan Diponegoro, dengan khusus dirumuskan dalam dua istilah penting: “satrio lelono” (I, 102), dan “sintesa mistik” (I, 135). Inilah kekhasan pokok dari Diponegoro. ‘Satrio lelono’ dapat menjadi satu cara melihat kepemimpinan di dalam kalangan istana/ politik sebagai alternatif dari yang lebih banyak mengemuka dengan gambaran pemimpin sebagai “satrio piningit”. Pengertian lainnya terkait dengan “sintesa mistik”, menghayati dalam dirinya hidup kerohanian dari mistik Jawa, Islam. (I, 135) Keduanya dapat menjadi cermin bagi sejarah masa kini. Terlebih bagi para pemimpin, dan orang-orang yang mau terlibat di dalam kepemimpinan apa pun. Tidak akan terbebas dari wawasan politik, ekonomi, pluralisme dan multikultural sebagaimana telah menjadi pengalaman P.

Diponegoro. Beliau tidak picik, karena kaya pengetahuan yang ditimba dari berbagai pustaka, kaya wawasan yang ditimba dan digeluti dalam pengalamannya.

Saya ingat satu buku tulisan Menteri Kehakiman Mr. Susanto Tirtoprojo, masa pemerintahan RI berada di Yogyakarta menggunakan istilah *Nayaka Lelana, Menteri Bergerilya*. Berkisah tentang pengalamannya tatkala memimpin kementerian Kehakiman pada masa agresi, secara bergerilya sebagaimana dilakukan oleh Jendral Sudirman bersama pasukannya. Peter Carey sendiri, menurut saya, mengejawantahkan ‘sarjana lelono’ dalam menyelami sejarah hidup Diponegoro dengan 1) pengembaraannya secara fisik, sekaligus juga 2) pengembaraan intelektual. Saya yakin juga disertai dengan 3) pengembaraan spiritual. Tanpa hal terakhir ini saya tidak yakin kalau Peter Carey mampu mendalami teks-teks dari naskah Jawa.

Kajian dan sajian Diponegoro karya Peter Carey menunjukkan kekuatan dan kekayaan tradisi literer yang menyimpan kisah para leluhur. Bahkan tradisi tulis juga menjadi praktek kuat dalam menjalin komunikasi di antara sejumlah tokohnya. Hal ini mengoreksi kesan yang selama ini ada karena tidak banyak muncul dalam pembahasan sejarah selama ini. Sekaligus meninggalkan pesan bagaimana hal tersebut dimanfaatkan sebagai inspirasi bagi pembentukan leadership bangsa masa kini.

Akibat Perang Diponegoro (Perang Jawa) diungkapkan dengan menyebutkan jumlah kerugian yang ditanggung Belanda. Bagaimana halnya dengan pihak pribumi? Tidak (banyak) dibicarakan. Hal demikian mengundang studi lanjut. Dalam *Cathetan Pegandring* (sudah ditransliterasi dari aksara Jawa, tapi belum selesai diterjemahkan alm Dr. Alex Sudewa) diperoleh sejumlah gambaran. *Cathetan Pegandring* merupakan catatan notulen pertemuan rutin Nayaka Kraton Mataram. Sebagian besar dilakukan pada hari Jum’at, sebagian kecil diselenggarakan hari lain. *Cathetan Pegandring* ditulis dalam 335 halaman buku tulis besar. Dimulai hari Sabtu, 25 Februari 1832. Catatan terakhir hari Kamis, 26 Nopember 1836. *Cathetan Pegandring* ini selesai ditulis ulang 26 Februari 1847. Dalam beberapa notulen pertemuan awal disebutkan sejumlah uang yang dipergunakan untuk memperbaiki istana Kraton Yogyakarta.

Demikianlah, Peter Carey telah menunjukkan hasil karyanya dengan Buku Diponegoro yang dipersembahkan untuk bangsa Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan. Saya menyandingkan dengan mengutip sebuah ungkapan seorang tokoh yang saya alami Mgr. Soegijapranata, “Apa arti kemerdekaan, bila gagal mendidik diri sendiri”.

- 7) Prof Sartono Kartodirdjo menjadi editor buku *Sejarah Perlawanan Perlawanan terhadap Kolonialisme* (1973). memperlihatkan sejumlah tokoh membangun dan mempertahankan wilayah-wilayah di Nusantara berhadapan dengan kekuatan asing. Sejumlah tokoh di Nusantara dalam memperjuangkan wilayahnya berhadapan dengan kolonialisme: Padang, Jawa, Aceh, Makasar. Terkait Yogyakarta, Perang Jawa P. diponegoro dan pasukan bergerak di Mancanegara Mataram berhadapan dengan Belanda selama 5 (lima) tahun. 1825 – 1830. Prof. Sartono Kartodirdjo pernah menyatakan kerinduannya bagaimana “menulis sejarah kemenangan RI dari Yogyakarta”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, *Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya*, Ceramah dalam rangka Pemberian Anugerah Hamengkubuwono IX, (Yogyakarta, 19 Desember 1995)

8) Selo Sumardjan - *Perkembangan ruang sosial dan kultural di Yogyakarta*

Dalam disertasi dan biografi Prof Selo Soemardjan<sup>2</sup>, tersurat sekaligus tersirat bagaimana Yogyakarta secara bertahap membangun ruang sosial dan kultural untuk para warganya. Ruang sosial dan kultural yang dimaksud mencakup bagaimana sistem pemerintahan dan birokrasi di Yogyakarta membentuk dirinya, sampai tercipta situasi yang memungkinkan warga Yogyakarta mengisi kegiatan harian, dan menjalankan berbagai aktivitasnya. Secara khusus terkait periode Jaman Pendudukan Jepang – Awal Kemerdekaan RI.

Dalam pembahasan ini, kita perlu menempatkan pengertian negara yang mencakup wilayah geografis, pemerintahan yang berdaulat, dan rakyat yang hidup di dalamnya. Disertasi dan kisah Prof Selo Soemardjan menyangkut berbagai segi terkait hal itu. Hal tersebut sekaligus terkait dengan pengalaman dirinya yang terlibat di dalam birokrasi yang dijadikan bahan kajian ilmiah dalam disertasinya. Termasuk juga pengalaman masyarakat yang menanggapi struktur yang tercipta tersebut dihidupi sehingga menjadi sistem yang dapat berjalan. Yogyakarta sebagai bagian dari RI yang merupakan negara baru, dalam praktek pemerintahannya telah berproses menjalani transformasi pemerintahan sejak masa pendudukan Jepang. Beberapa hal yang dikemukakan terkait dengan sistem pengorganisasian (penyederhanaan kapanewon/ camat dan kelurahan di tingkat desa), pembentukan sistem rukun warga dalam kelompok RT (Rukun Tetangga) dan RK (Rukun Kampung), serta sistem permusyawaratan warga melalui perwakilan.

Saat memasuki era awal kemerdekaan, pengorganisasian baru yang tercipta, antara lain terkait dengan membangun struktur dan jaringan keamanan dalam Laskar Rakyat Mataram. Dalam hal ini, Sultan Hamengku Buwono IX menjabat pimpinan tertinggi dengan pangkat Kolonel, (Wedana) Selo Soemardjan yang bekerja di Kepatihan menjadi Kepala Staf dengan pangkat Letnan Kolonel, dan kemudian berjenjang ke bawah membentuk satuan-satuan kecil yang berada di bawah komando pimpinan orang-orang tertentu. Mendengar kata merdeka, pandangan penduduk tentang hal tersebut sangat beragam sehingga tidak mudah untuk mengadakan pengaturan. Proses tersebut perlu ditempatkan dalam situasi ketika Yogyakarta tengah memperoleh status baru menjadi ibukota RI, dan Angkatan Bersenjata tengah membentuk barisan keamanan yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Perubahan status Yogyakarta sebagai ibukota membuat puluhan ribu warga baru pendukung pemerintahan RI masuk ke Yogyakarta.<sup>3</sup> Daed Joesoef sebagai pelaku

<sup>2</sup> Selo Soemardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jakarta, Komunitas Bambu, 2009. Sebelumnya telah terbit dalam edisi Bahasa Inggris, *Social Change in Jogjakarta* (1962). Terjemahannya dalam bahasa Indonesia *Perubahan Sosial di Yogyakarta* (1981) diterbitkan Gadjahmada University Press. Biografi Selo Soemardjan ditulis Abrar Yusra, *Komat-kamit. Biografi Selo Soemardjan*, Jakarta, Gramedia, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1995

<sup>3</sup> Peningkatan jumlah penduduk Yogyakarta saat menjadi ibukota angkanya dari 170 ribu jiwa menjadi 600 ribu jiwa. Sutrisno Kustoyo, dkk. (ed.) *Sejarah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1997, hal. 338. Selo Sumardjan menyebut penduduk Yogyakarta hasil sensus jaman Jepang jumlahnya mencapai 1,8 juta jiwa. Tambah penduduk baru yang masuk sebanyak 50.000 orang. Abrar Yusra, *Komat-kamit. Biografi Selo Soemardjan*

sejarah menggambarkan situasi bagaimana penduduk yang berjubel dan kemiskinan yang sangat terasa.<sup>4</sup>

Satu hal yang juga dikemukakan Selo Soemardjan adalah pencetakan mata uang RI (ORI) yang membuat sistem moneter dapat berjalan.<sup>5</sup> Hal tersebut dapat menunjang kehidupan warga dengan beragam aktivitasnya dalam segala keterbatasannya. Dalam lingkup pengalaman serupa saat kesulitan uang ini, dapat ditempatkan sumbangan kekayaan Sultan pribadi yang menyumbangkan uang sampai sejumlah 6 juta gulden untuk penyelenggaraan pemerintahan RI.<sup>6</sup> Situasi yang berkembang pada masa tersebut, memberi gambaran bagaimana pemerintahan RI dapat hidup di Yogyakarta. Bahkan tetap berlangsung saat Soekarno dan Hatta dalam pengasingan, Jendral Sudirman dalam gerilya, beberapa menteri juga mengemban tugasnya di dalam suasana gerilya.<sup>7</sup> Sementara Pemerintahan Darurat RI dipimpin oleh Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi.

Ada sebuah kesulitan saya hadapi ketika berusaha membayangkan kota Yogyakarta antara tahun 1946-1950 yakni saat menjadi Ibukota RI. Padahal Bukittinggi yang dalam beberapa waktu menjadi Ibukota Pemerintah Darurat Republik Indonesia telah menjadi sebuah kota yang sedemikian padat sehingga antara lain menimbulkan problem perumahan.<sup>8</sup> Bagaimana halnya dengan kota Yogyakarta pada masa tersebut? Hampir seluruh lembaga pemerintahan negara RI dengan berbagai departemennya berada di Yogyakarta. Belum banyak catatan sejarah membahas tentang hal ini.<sup>9</sup> Yang lebih banyak terlihat peninggalannya adalah monumen perjuangan bersenjata yang banyak ditemukan di berbagai sudut kampung di Yogyakarta. Padahal sejumlah catatan telah membahas hal-hal yang terkait dengan kehidupan menegara dengan berbagai macam permasalahannya selama pemerintahan RI berada di Yogyakarta.<sup>10</sup>

<sup>4</sup> Daoed Joesoef, *Dia dan Aku. Memoar Pencari Kebenaran*, Jakarta, Penerbit Kompas, 2006

<sup>5</sup> Abrar Yusra, *Komat-kamit. Biografi Selo Soemardjan*, hal. 150-152

<sup>6</sup> Dr. Hadinoto menyebut dalam akuntansi negara uang tersebut sebagai *first capital*. Majalah **Gatra**, Februari 2008. Keluarga Wakil Presiden masih menyimpan mata uang sebagai gaji pemberian Sultan Hamengku Buwono IX. Atmakusumah (ed.), *Tabta untuk Rakyat*, Jakarta, Gramedia

<sup>7</sup> Mr. Sukiman Menteri Dalam Negeri, Mr. Susanto Tirtoprojo sebagai Menteri Kehakiman, Menteri Supeno sebagai Menteri Pemuda, IJ Kasimo sebagai Menteri Kemakmuran. Mr. Susanto Tirtoprojo menuliskan pengalamannya dalam tulisan yang berbentuk tembang macapat. Lih. buku *Nayaka Lelono, Menteri Bergerilya*.

<sup>8</sup> H. Sutan Muhammad Rasyid menggambarkan perkembangan penduduk kota Bukittinggi yang semula hanya 2.000 orang berubah menjadi 100.000. "Kenang-kenangan Bergaul dengan Bung Hatta", dalam *Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan*, Meutia F. Swasono (ed.), Penerbit Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 237

<sup>9</sup> Bahkan buku peringatan 200 tahun Yogyakarta tahun 1956 pun tidak banyak menyebutkan. *200 Tahun Yogyakarta*, (tanpa penerbit, tanpa angka tahun). Dari sejumlah catatan yang tersebar serta sejumlah keterangan lisan tentang beberapa tempat penting dapat disebut: Gedung Negara (Jl. A. Yani) menjadi istana dan kantor Presiden dan Wakil Presiden, Gedung Bank Indonesia (Jl. Trikora) adalah Kantor Pusat Departemen Keuangan, Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi DIY (dulu, Jl. KHA Dahlan) adalah Kantor Pusat Departemen Penerangan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Agama Katolik Universitas Sanata Dharma (sekarang, Jl. Ahmad Jajuli) adalah Kantor Pusat Departemen Pertahanan. Sejumlah gedung di wilayah Gondokusuman dan Jetis merupakan kompleks persekolahan Sekolah Guru Bawah (SGB) semula merupakan sekolah yang terpisah dalam Sekolah Guru Laki-laki (SGL) dan Sekolah Guru Putri (SGP), serta Sekolah Guru Atas (SGA) beserta asramanya.

<sup>10</sup> N.H. Simanjuntak, S.H., *Kabinet-kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*, Penerbit Jambatan, Jakarta, 2003, hal. 23-107

Momen sekarang sebagai kesempatan berjarak lebih dimaksudkan untuk menempatkan kembali salah satu faktor yang membuat keistimewaan DIY. Ini terkait dengan keterlibatan DIY terhadap eksistensi RI dalam periode 1946-1950, saat di mana ibukota RI berada di Yogyakarta dan sebagian besar wilayah RI merupakan wilayah propinsi DIY sekarang.

### **Kesan atas Yogyakarta Periode 1946-1950**

Catatan sejarah yang menggambarkan situasi perpindahan ibukota RI dari Jakarta ke Yogyakarta, antara lain dituliskan oleh Mangil, seorang ajudan Presiden Sukarno.<sup>11</sup> Belum banyak kajian sejarah yang mengetengahkan pertimbangan pimpinan negara RI mengapa memilih Yogyakarta. Tidak seperti halnya pertimbangan dan rencana Sukarno yang pernah memilih Palangkaraya untuk menjadi ibukota RI.<sup>12</sup> Padahal terkait dengan masa tersebut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo pernah menyatakan kerinduannya bagaimana “menulis sejarah kemenangan RI dari Yogyakarta”.<sup>13</sup> Beberapa kesaksian pada masa-masa tersebut dapat dijadikan pangkal tolak untuk penelitian sejarah lebih lanjut.<sup>14</sup> Situasi kota Yogyakarta saat itu yang diwarnai situasi padat penduduk dan suasana kemiskinan sempat disebut dalam sebuah catatan sejarah.<sup>15</sup> Sebuah angka yang menyebutkan jumlah pengungsi antara lain ada dalam catatan dari George Mc Kahin yang pada akhir 1948 datang ke Yogyakarta sebagai awal karirnya untuk menjadi seorang indonesianis.<sup>16</sup>

Di sisi lain, sejarah RI di Yogyakarta di masa tersebut lebih banyak diwarnai oleh rekaman sejarah militer.<sup>17</sup> Padahal bukan itu saja. Tidak dapat dikatakan bahwa sebagian besar masa tersebut lebih diwarnai oleh sejarah perjuangan militer. Sejarah diplomasi dengan pihak luar (Belanda dan PBB) juga berlangsung pada masa tersebut. Cukup banyak kajian sejarah yang terkait dengan masa diplomasi itu. Di samping itu, masa tersebut juga diwarnai oleh beberapa kali pergantian kabinet yang berkuasa.<sup>18</sup>

Bagaimana halnya dengan pertanyaan siapa yang menopang keberlangsungan negara RI terkait dengan keuangan negara RI pada masa tersebut? Dari mana pemerintah RI menggaji para pejabat pemerintah (beserta staf birokrasi) yang menjalankan roda pemerintahan? Bagaimana Yogyakarta sebagai ibukota RI menopang seluruh bebannya sebagai negara baru yang tengah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya? Pertanyaan-pertanyaan demikian mengusik untuk menemukan dan makin mengukuhkan posisi keistimewaan DIY di dalam pemerintahan RI yang ada sekarang.

<sup>11</sup> H. Mangil Martowidjojo, *Kesaksian tentang Bung Karno 1945 – 1967*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 21-98

<sup>12</sup> Rencana Ibukota RI di Palangka Raya..., Ombak, 2006

<sup>13</sup> Sartono Kartodirjo, *Seputar Yogyakarta dan Beberapa Tokoh Kepemimpinannya*, Ceramah dalam rangka Pemberian Anugerah Hamengkubuwono IX, (Yogyakarta, 19 Desember 1995)

<sup>14</sup> Paramita Abdurrachman dan Mara Karma, “Menembus Blokade”, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, “Republik di Bawah Kepungan”, dalam *Gelora Api Revolusi*, Colin Wild dan Peter Carey (ed.), hal. 145-149, 187-191

<sup>15</sup> Daoed Joesoef, *Dia dan Aku. Memoar Pencari Kebenaran*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 83-85

<sup>16</sup> Dari jumlah umat Katolik yang ada di Indonesia, Kahin menyebut bahwa sejumlah ... memilih masuk ke wilayah RI di Yogyakarta. Dalam majalah *Commonweal*, edisi 31 Desember 1948

<sup>17</sup> *Yogya Benteng Proklamasi*, Badan Musyawarah Musea, Yogyakarta, 1985

<sup>18</sup> Mulai dari Kabinet Syahrir I, II, III, Amir Sjarifuddin I, II, Hatta I, II, Kabinet Darurat (Desember 1948-13 Juli 1949).

## Catatan Sejarah yang Terlupakan

Salah satu yang memberikan peninggalan catatan sejarah RI pada masa tersebut adalah tulisan perjalanan yang ditulis Mr. Susanto Tirtoprojo. Bersama beberapa menteri yang lain, sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Moh. Hatta II, Mr. Susanto Tirtoprojo melakukan sebuah perjalanan gerilya. Ia menuliskan pengalamannya di dalam masa tersebut.<sup>19</sup> Kendati demikian nama Mr. Susanto Tirtoprojo tidak tercantum di dalam *Ensiklopedi Indonesia* yang menjadi buku acuan paling mudah untuk menemukan tokoh-tokoh sejarah yang berperan di Indonesia, pada masa-masa tertentu. Apakah hal ini bukan berarti betapa sejarah RI masa 1946-1950 dapat dikatakan terasa miskin tulisan sejarah perjuangan sipil pada masa tersebut. Kalau seorang tokoh sejarah sipil yang terlibat penuh tidak banyak diperhitungkan, bagaimana nasib sejarah yang lain pada masa itu.

Catatan sejarah masa 1946-1950 lebih banyak menempatkan peranan usaha diplomasi, dan sejarah gerakan militer. Memang hal tersebut tidak dapat dielakkan. Orang-orang yang terlibat sendiri telah menuliskan sejarahnya. Bagaimana aspek sejarah lainnya yang luput dari perhatian. Siapa yang akan mencoba menelusurinya kembali.

### *Posisi dan Perjuangan Mr. Soedarisman*

Dalam situasi itulah peran Mr Soedarisman Poerwokusumo sebagai walikota Yogyakarta ditempatkan. Dia ditunjuk Sultan pada tanggal 22 Juli 1947 menggantikan Ir. Moch Enoch. Selo Soemardjan menyebut bagaimana penunjukan yang diserahkan kepada Sultan terkait dengan pemerintahan yang tidak berjalan karena ketidakmampuan walikota untuk menjalin komunikasi.<sup>20</sup> Mr. Soedarisman sendiri menyebut penunjukannya dari fakta bagaimana Ir. Moch Enoch yang merangkap jabatan sebagai Menteri Pekerjaan Umum berencana menyertai Presiden Soekarno yang akan mengungsi ke Gunung Wilis.<sup>21</sup>

Tidak banyak yang dikisahkan oleh Mr. Soedarisman tentang praktek pengalaman yang dijalani. Beberapa peristiwa yang disebutkan, bagaimana dalam situasi genting Sultan memerintahkan tugas penting yang diembannya. Penugasan Sultan diungkapkan dengan bahasa Belanda. “*Als puntje bij paaltje komt, laat alles aan mij over*“. Komunikasi dengan bahasa Belanda oleh Sultan rupanya menjadi policynya, sebagai cara untuk membangun suasana yang egaliter.<sup>22</sup> Ada 3 prinsip lain yang perlu dilaksanakan oleh kepala daerah: 1) Kepala Daerah tidak boleh meninggalkan wilayahnya, 2) Jangan sampai Kepala Daerah ditangkap oleh Belanda, dan 3) Kepala Daerah jangan menyerah kepada Belanda.

Dalam melaksanakan pesan tersebut, Mr. Soedarisman pernah mengalami interogasi pihak tentara Belanda, tatkala melakukan pengeledahan menjelang serangan umum 1 Maret 1949, di Kepatihan, kantor pemerintahan Yogyakarta yang didiami bersama keluarga. Di hadapan militer Belanda yang melakukan pengeledahan, Mr Soedarisman mengaku sebagai petugas jaga. Kehadiran anak isterinya yang mengungsi di Kepatihan membuatnya selamat dari aksi

<sup>19</sup> Susanto Tirtoprojo, *Nayaka Lelana Menteri Bergerihya*, U.P. Indonesia, Yogyakarta, 1985

<sup>20</sup> Abrar Yusra, *Komat-kamit. Biografi Selo Soemardjan*

<sup>21</sup> MR. Soedarisman Poerwokusumo, “Melacak Sejarah “Yogya-Kembali”, dalam Sulastin Sutrisno-Darusuprpto-Sudaryanto (ed.), *Bahasa Sastra-Budaya*, Yogyakarta, Gadjahmada Press, 1985, hal. 642-660

<sup>22</sup> “Jika sewaktu-waktu tentara Belanda menduduki Jogjakarta, kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Serahkanlah semuanya kepadaku” Dengan Selo Soemardjan, Sultan juga menggunakan bahasa Belanda, untuk tidak ngoko. Kendati pun lawan bicaranya akan menjawabnya dengan bahasa Jawa kromo inggil.

penggeledahan Belanda.<sup>23</sup> Itulah salah satu peristiwa genting yang dikisahkan saat mengemban tugas sebagai walikota dengan prinsip-prinsip tugas sebagaimana disebut di atas.

Memang tidak bisa membandingkan situasi saat itu dengan situasi sekarang. Keberadaan Yogyakarta diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa. Berbeda dengan situasi sekarang yang semua sistem sudah berjalan di dalam fungsinya masing-masing.

### *Imaji tentang Yogyakarta*

Kota akan membentuk para warga yang mendiaminya dengan aktivitas keseharian yang dijalani. Sebaliknya juga terjadi, kota akan hidup, dibentuk, dibangun dan dikembangkan oleh para warga kotanya. Tentu kota yang bersandar pada perdagangan akan berbeda dengan kota yang banyak diwarnai oleh lembaga pendidikan. Akan berbeda pula dengan kota industri, dan seterusnya. Yogyakarta kisahnya diawali dengan pusat kerajaan Mataram Ngayogyakarta Hadiningrat. Juga peran yang pernah diemban oleh Yogyakarta sebagai ibukota RI pada masa awal kemerdekaan. Dan setelah awal kemerdekaan terlampaui, diwarnai dengan pendirian berbagai institusi pendidikan tinggi untuk menyediakan tenaga ahli pada bidang-bidang birokrasi pemerintahan, tenaga pendidik, pemikir dan pelaku bidang seni, budaya dan agama untuk disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia. Hal-hal inilah yang memberi warna pada kota Yogyakarta beserta para warganya.

### **Telaah Sejarah Yogyakarta dari Sastra Babad**

Bambang Purwanto memperlihatkan bagaimana sastra babad perlu dikritisi.<sup>24</sup> Antara lain terkait dengan penggunaan *Serat Surya Raja* untuk menelusuri historiografi Indonesia, khususnya terkait dengan Yogyakarta. Memang ada sejumlah sejarawan menggunakan sastra babad untuk menempatkan sejarah Yogyakarta (Ricklef, Peter Carey). Di samping itu, model penulisan pengalaman dalam masa gerilya (1946-1950) yang dilakukan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo juga dituliskan dengan model *babad*. (Bercerita tentang pengalaman lewat tembang.)

S Margana memperlihatkan ada sedemikian banyak dokumen sejarah yang memperlihatkan bagaimana Yogyakarta jauh sebelum kemerdekaan RI.<sup>25</sup> Sumber sejarah non babad memang belum banyak dipergunakan. Inilah yang perlu diusahakan untuk menjawab pertanyaan tersebut (bagaimana sejarah perkembangan Yogyakarta). Keterbatasan dalam menemukan sumber yang mampu menjadi acuan penulisan sejarah telah membuat sejarah Yogyakarta lebih banyak dilakukan dengan mengkaji serat babad. Sedangkan sumber baru yang ada dan sebagian telah dipublikasi belum banyak dieksplorasi. (*The Archive of Yogyakarta, Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874, Cathetan Pegandring*). Kedua contoh buku dan satu transliterasi yang belum diterbitkan<sup>26</sup> dapat menjadi sumber untuk dapat dieksplorasi guna penulisan sejarah Yogyakarta.

### ***Cathetan Pegandring* sebagai Titik Berangkat**

<sup>23</sup> Hal. 649-650

<sup>24</sup> Bambang Purwanto, *Gagalnya Historiografi Indonesiasentris?!*, Ombak, Yogyakarta, 2006, hal. 88-126

<sup>25</sup> S. Margana, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004

<sup>26</sup> Usaha transliterasi dilakukan oleh Prof. Dr. Alex Sudewa. Tatkala tengah mengusahakan terjemahan ke dalam bahasa Indonesia atas naskah tersebut, beliau menderita sakit darah tinggi dan mengalami kelumpuhan.

*Catbetan Pegandring* merupakan peninggalan sejarah berupa notulen pertemuan tiap *selapan* (35) hari yang tiap kali dituliskan dalam masa kerajaan Yogyakarta (1832-1836) pasca Perang Diponegoro. Banyak hal dibahas di dalam acara *selapanan* kerabat kerajaan tersebut. Antara lain terkait dengan pembagian tanah, penugasan, utang piutang, aturan dalam masyarakat, dll. Catatan tersebut memperlihatkan adanya ketertiban pencatatan tentang berbagai masalah dan penanganannya, dan hasil pembicaraan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengumpulan catatan-catatan serupa tengah diusahakan oleh Pusat Arsip Daerah DIY yang menyusun *Seranai Arsip Kraton Yogyakarta* sebagai daftar katalog semacam *Catbetan Pegandring*.<sup>27</sup> *Seranai* tersebut memperlihatkan peran surat menyurat sebagai manuskrip yang dapat menjadi referensi.<sup>28</sup> Demikian pula halnya dengan kumpulan dokumen tentang Yogyakarta yang lain.

Memperhatikan sejumlah tulisan yang ada tentang sejarah Yogyakarta, memang terasa ada sedemikian banyak periode sejarah yang terpenggal. Pada satu sisi kajian sejarah yang terkait dengan masa lampau dapat kita temukan. Demikian pula halnya dengan sejarah kontemporer masa sekarang. Namun perlu diakui bahwa dalam kajian sejarah Yogyakarta masih ada ketergantungan kepada sejarawan asing. Kendati pun demikian kini telah tersedia sejumlah sumber yang dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut. Sekaligus juga perlu untuk secara kreatif menelusuri pokok-pokok penting yang belum disentuh. Dalam kaitan dengan pembicaraan tentang keistimewaan DIY, ada topik-topik tertentu yang memberi kesempatan untuk memperluas pemahaman dan penafsiran tentang tersendiri tentang keistimewaan suatu daerah. Hal ini dimaksudkan untuk tidak terjebak di dalam keistimewaan melulu pada aspek tata pemerintahan. Kecuali itu, kajian ini juga dapat dimaksudkan untuk memperluas wawasan sejarah bagi kalangan luas, secara khusus untuk para birokrat dan anggota parlemen tingkat pemerintahan pusat dan daerah. Yogyakarta menjadi sedemikian penting karena masa balita pemerintahan RI berada di wilayah Yogyakarta.

### **Perlunya Pandangan Dasar untuk Memaknai Peranan Yogyakarta**

Di dalam sejarah peradaban, pemindahan ibukota sebuah negara atau kerajaan memiliki keragaman motif.<sup>29</sup> Motivasi pemindahan RI dari Jakarta ke Yogyakarta terkait dengan penyelamatan negara yang masih baru, dan terancam terhadap kedatangan kekuatan kolonial lama. Di samping masih ada sejumlah motif lain yang perlu digali. Di sisi lain, Yogyakarta perlu mendefinisikan diri dalam menerima peran untuk menjadi ibukota selama dalam pelarian. Terkait dengan hal tersebut maka diperlukan sebuah sudut pandang tertentu yang akan membantu untuk melihat sejarah yang ada.

- 9) *Creative Fidelity* sebagai prinsip dasar untuk berakar tradisi sekaligus kreatif berhadapan dengan tantangan aktual. Saya merasa penetapan sumbu filosofi untuk Yogya sebagaimana dikemukakan skema di atas mengalami kemunduran. Pre colonial – colonial – pasca colonial – modern.

<sup>27</sup> *Seranai Sri Sultan Hamengkubuwono IX*, 2006, *Seranai Sri Sultan Hamengkubuwono VII dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX*, 2005. Di dalamnya terdapat sejumlah manuskrip yang diklasifikasikan di dalam beberapa pokok. Jumlah manuskrip di dalam kedua katalog tersebut masih sangat terbatas sehingga belum mencukupi untuk menjadi sumber penelitian.

<sup>28</sup> *The Archive of Yogyakarta* memuat sejumlah surat-menyurat. P. Carey (ed), *The Archive of Yogyakarta*, Oxford University Press, ...

<sup>29</sup> A. Toynbee, *A Study of History*, Oxford University Press, 1972, hal. 277-281

Saya pernah bicara saat peluncuran buku GKR Hemas 60 tahun. Kemudian saat beliau merayakan tumbuk Ageng (64 tahun) saya ikut menulis. Yang saya aulas terkait sebutan dan gelar beliau: Bu Ratu dan GKR Hemas. Saya mengevaluasi: Kalau beberapa konteks peristiwa besar sebagai saat-saat kritis itu cukup dialami, biografi ini tentu menjadi semakin kokoh. Menghadirkan Bu Ratu yang memang berakar pada konteks masyarakat dan sejarahnya. Seorang Bu Ratu yang kiprahnya melewati tikungan-tikungan tajam, tidak hanya ditempatkan dalam konteks keluarga, teman-teman, atau organisasi tapi juga dan terlebih dalam konteks masyarakatnya. Masyarakat yang bergerak dalam sejarahnya, setiap kali harus berhadapan dengan situasi krisis.

Kiranya, kisah “*GKR Hemas atau Bu Ratu dengan gelar dan sebutan yang menyimpan hormat sekaligus kedekatan*” akan terasa semakin menjadi pohon rindang dengan daun, sulur dan cabang-cabangnya karena berakar dan tumbuh pada tanah yang luas, subur, berpasir, berbatu bahkan bergunung api. Demikian pun buah-buah yang dihasilkannya. Di atas tanah Yogyakarta, yang memang sejak semula diabdikan untuk menebarkan benih-benih hidup baru pada lingkup yang lebih luas di seluruh hamparan Nusantara. (Acara Launching Biografi GKR Hemas, Yogyakarta 31 Oktober 2012) Kedua adalah menulis dalam buku TUMBUK AGENG – 64 Tahun.

Terima kasih.

Yogyakarta, 9 Oktober 2023

Dr. G. Budi Subanar, SJ